



Relasi Bahasa Dan Dialek Dalam Perspektif Teoretis Dan Kebijakan: Kajian Atas Identitas, Variasi, Dan Perubahan Bahasa

Arum Rahmatika*¹, Ade Nandang²

Email: 2249010038@student.uinsgd.ac.id¹, adenandang@uinsgd.ac.id²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia.

DOI: <http://doi.org/10.35931/am.v8i2.5447>

Article Info

Received: July 14, 2025

Revised: September 29, 2025

Accepted: September 30, 2025

Correspondence:

Phone: +6281323349692

Abstract: This article explores the complex relationship between language and dialect from theoretical and sociolinguistic perspectives, focusing on three main dimensions: linguistic identity, socio-geographical variation, and the role of dialects in language change. The study argues that dialects are not merely informal variants of standardized language, but authentic expressions of social and cultural identity, as well as active agents in linguistic dynamics. Through a literature-based analysis, this paper highlights how dialects serve as markers of group solidarity, legitimate forms of linguistic variation, and sources of innovation in the evolution of language. However, dialects are often marginalized due to the dominance of standardized language, institutionalized through formal education and national language policies. The critical analysis in this article underscores the importance of recognizing dialects within educational systems and public policy as part of preserving linguistic diversity. The study recommends a more inclusive approach to language planning and multilingual education as essential strategies toward linguistic justice and the empowerment of local identities.

Keywords: *Dialect, Hegemony, Language Change, Language Policy, Linguistic Identity, Social Variation,*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sistem simbolik yang kompleks dan terstruktur, digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, serta membentuk realitas sosialnya. Dalam konteks masyarakat multibahasa, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana konstruksi identitas, simbol kekuasaan, dan bahkan alat ideologis. Namun demikian, keberadaan dialek—varian dari bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu—sering kali menempati posisi ambivalen: di satu sisi diakui sebagai bagian dari kekayaan linguistik, namun di sisi lain sering dipandang sebagai bentuk “rendahan” dari bahasa standar (Trudgill, 2000).

Perdebatan antara bahasa dan dialek bukanlah hal baru dalam studi linguistik. Sejumlah ahli menekankan pentingnya pemisahan keduanya secara terminologis dan konseptual. Namun, batas antara keduanya kerap kabur, terlebih ketika faktor politik, budaya, dan identitas ikut mempengaruhi kategorisasi tersebut. Dalam kenyataannya, keputusan apakah suatu varian disebut

“bahasa” atau “dialek” lebih sering dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik kebahasaan daripada oleh kriteria linguistik murni (Wardhaugh & Fuller, 2015).

Perbedaan bahasa dan dialek tidak semata-mata terletak pada struktur fonologis atau sintaksisnya, tetapi juga pada konteks sosiopolitik yang melingkupinya. Misalnya, varian Bahasa Melayu yang dipakai di Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki banyak kemiripan struktural, tetapi diklasifikasikan sebagai bahasa berbeda karena alasan identitas nasional. Sebaliknya, dalam kasus Tiongkok, banyak varian yang sangat berbeda satu sama lain tetap disebut “dialek” karena disatukan oleh kerangka ideologis yang sama (Crystal, 2003).

Isu ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fenomena identitas linguistik. Dialek sering kali menjadi simbol lokalitas, kebanggaan budaya, dan ekspresi komunitas tertentu. Penggunaan dialek dalam komunikasi sehari-hari tidak hanya menunjukkan asal geografis seseorang, tetapi juga mencerminkan afiliasi sosial dan sikap terhadap struktur kekuasaan yang lebih

luas (Holmes, 2013). Oleh karena itu, dialek tak bisa dianggap sekadar turunan dari bahasa standar, melainkan sebagai bentuk praksis budaya yang bernilai.

Dalam konteks variasi linguistik, dialek juga menjadi wujud nyata dari dinamika sosial masyarakat. Masyarakat yang heterogen secara geografis, sosial, dan budaya akan menunjukkan keragaman dalam bentuk bahasa yang digunakan. Variasi ini mencakup aspek fonetik, leksikal, hingga pragmatis, dan kerap kali menunjukkan gradasi yang membentuk kontinum antara bahasa dan dialek (Hudson, 1996). Konsep ini memperlihatkan bahwa dikotomi bahasa-dialek bukanlah hal yang mutlak, melainkan hasil konstruksi historis dan ideologis.

Selain sebagai bagian dari variasi, dialek juga berperan penting dalam proses perubahan bahasa. Banyak perubahan linguistik yang kini dianggap bagian dari bahasa standar, pada awalnya merupakan bentuk varian lokal atau dialektal. Hal ini mengindikasikan bahwa dialek merupakan sumber inovasi linguistik yang signifikan. Proses adopsi dan standarisasi unsur-unsur dialektal ke dalam bahasa utama mencerminkan interaksi yang dinamis antara bentuk-bentuk bahasa yang berbeda (Aitchison, 2001).

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu masih memperlihatkan kesenjangan dalam membahas relasi dialek dan bahasa secara integratif. Beberapa studi terfokus pada aspek fonologis dan struktural, sementara lainnya menyoroti aspek sosiologis dan kultural secara terpisah. Padahal, pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara bahasa dan dialek membutuhkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek linguistik, sosiolinguistik, dan bahkan politik bahasa (Ferguson, 1959).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara bahasa dan dialek secara teoretis, dengan menyoroti peran keduanya dalam pembentukan identitas, variasi linguistik, serta proses perubahan bahasa. Melalui pendekatan interdisipliner, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas relasi bahasa dan dialek, serta kontribusinya dalam memperkaya dinamika komunikasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai relasi antara bahasa dan dialek dalam dimensi identitas, variasi, dan perubahan linguistik. Pendekatan ini dipilih karena tema yang dibahas bersifat konseptual dan menuntut pemahaman komprehensif terhadap teori-teori linguistik, sosiolinguistik, dan dialektologi yang telah berkembang dalam literatur akademik. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk menelusuri, mengkaji, dan membandingkan

berbagai pemikiran dan temuan yang relevan secara sistematis (Zed, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur ilmiah berupa buku-buku pokok dalam bidang linguistik dan sosiolinguistik, artikel jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, serta karya-karya seminal dari para ahli seperti Peter Trudgill, Ronald Wardhaugh, Janet Holmes, dan David Crystal. Data sekunder tersebut dianalisis secara kritis dan sintetik untuk membangun argumen teoretis yang mendalam dan koheren mengenai hubungan antara bahasa dan dialek serta implikasinya terhadap dinamika sosial dan perubahan bahasa (Creswell, 2013).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi tematik (*thematic content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan relasi bahasa dan dialek. Tema-tema tersebut antara lain: (1) definisi dan distingsi antara bahasa dan dialek, (2) aspek identitas dan prestise sosial dalam penggunaan dialek, (3) variasi linguistik sebagai produk interaksi sosial, dan (4) dialek sebagai sumber perubahan linguistik. Setiap tema dikaji berdasarkan preseden akademik yang kuat untuk memastikan validitas argumen (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Selain itu, pendekatan interdisipliner juga digunakan untuk memperkaya analisis, dengan memadukan perspektif linguistik struktural, sosiolinguistik, dan teori identitas budaya. Pendekatan ini penting karena relasi antara bahasa dan dialek tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek kebahasaan semata, tetapi juga melalui dimensi sosial, politis, dan historis yang menyertainya (Joseph, 2004). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif, dengan penekanan pada kedalaman makna daripada generalisasi kuantitatif.

Dengan desain metodologis semacam ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan suatu sintesis teoretis yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara bahasa dan dialek secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam konteks kebijakan bahasa, pendidikan multibahasa, dan pelestarian budaya lokal.

LANDASAN TEORI

Definisi Bahasa dan Dialek

Bahasa didefinisikan sebagai sistem simbol bunyi yang arbitrer dan konvensional, digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berpikir dalam komunitas sosial tertentu. Ferdinand de Saussure (1916) menyebut bahasa (*langue*) sebagai sistem abstrak tanda-tanda linguistik yang berfungsi dalam masyarakat. Bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen pembentuk realitas sosial dan identitas budaya (Crystal, 2003). Dalam kerangka generatif, Noam Chomsky membedakan antara *competence* (kemampuan bahasa ideal) dan *performance*

(penggunaan aktual), menegaskan bahwa bahasa merupakan sistem aturan yang mendasari ujaran manusia (Chomsky, 1965).

Sementara itu, dialek secara umum merujuk pada variasi regional atau sosial dari suatu bahasa yang memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam hal fonologi, leksikon, dan sintaksis. Peter Trudgill (2000) mendefinisikan dialek sebagai "any variety of a language which is characteristic of a particular group of the language's speakers." Artinya, dialek merupakan bagian tak terpisahkan dari bahasa, tetapi tidak memiliki status standar atau resmi. Dalam perspektif sosiolinguistik, dialek bukanlah bentuk "rusak" dari bahasa, melainkan refleksi dari realitas sosial dan geografis yang hidup.

Kriteria Pembedaan Bahasa dan Dialek

Pembedaan antara bahasa dan dialek sering kali dilandaskan pada kriteria linguistik maupun non-linguistik. Kriteria linguistik mencakup aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jika dua varietas tidak saling dipahami (*mutually unintelligible*), maka sering kali dianggap sebagai dua bahasa yang berbeda. Sebaliknya, apabila terdapat pemahaman timbal balik yang tinggi, maka lebih tepat dikategorikan sebagai dialek dari satu bahasa (Wardhaugh & Fuller, 2015). Namun, realitas sosial sering kali tidak sejalan dengan kriteria linguistik tersebut.

Faktor politik dan identitas nasional sering kali lebih menentukan apakah suatu varian dikategorikan sebagai bahasa atau dialek. Misalnya, Bahasa Serbia, Kroasia, dan Bosnia secara linguistik sangat mirip, namun diakui sebagai bahasa yang berbeda karena alasan historis dan politis. Sebaliknya, varietas "bahasa" Cina seperti Mandarin dan Kanton sangat berbeda satu sama lain, tetapi tetap disebut "dialek" karena kebijakan politik yang memaksakan kesatuan nasional (Crystal, 2003). Oleh karena itu, batas antara bahasa dan dialek lebih bersifat ideologis daripada objektif.

Perspektif Sosiolinguistik: Bahasa, Dialek, dan Kekuasaan

Dari perspektif sosiolinguistik, bahasa dan dialek tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, distribusi kekuasaan, dan relasi antar kelompok. Bahasa standar sering kali dikonstruksi oleh institusi negara sebagai simbol identitas nasional, sedangkan dialek dianggap sebagai varian lokal yang kurang bernilai secara sosial. Menurut Bourdieu (1991), bahasa standar memiliki "kapital simbolik" yang membuatnya lebih diakui secara sosial, ekonomi, dan politik, sementara dialek cenderung terpinggirkan.

Dengan demikian, dialek tidak hanya menandakan perbedaan linguistik, tetapi juga membawa muatan sosial dan ideologis. Pilihan untuk menggunakan dialek atau bahasa baku dalam situasi tertentu mencerminkan relasi kekuasaan, identitas, dan resistensi terhadap dominasi

budaya. Di berbagai negara, kampanye revitalisasi dialek lokal sering kali juga menjadi bagian dari gerakan pelestarian budaya dan penegasan identitas lokal (Holmes, 2013).

Kontinum Bahasa dan Fenomena Diglosia

Salah satu pendekatan penting dalam memahami relasi bahasa dan dialek adalah konsep kontinum linguistik (*dialect continuum*). Dalam konteks ini, tidak ada batas yang tegas antara satu dialek dengan lainnya atau antara dialek dan bahasa baku. Setiap varian berada dalam spektrum yang saling bertaut, dan perubahan biasanya bersifat gradual (Hudson, 1996). Konsep ini menjadi penting ketika menganalisis fenomena bahasa seperti Bahasa Arab, yang memiliki gradasi dari Bahasa Arab Standar Modern (Fusha) ke berbagai dialek lokal seperti Mesir, Syam, dan Maghrib.

Selain itu, fenomena *diglosia* sebagaimana dikemukakan oleh Ferguson (1959), menunjukkan adanya dua bentuk bahasa yang hidup berdampingan dalam satu komunitas: bentuk "tinggi" (H) yang digunakan dalam situasi formal dan bentuk "rendah" (L) yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak masyarakat Arab, Fusha menjadi bentuk H, sementara lahjah-lahjah lokal menjadi bentuk L. Meskipun bentuk L tidak memiliki status resmi, ia tetap hidup dan berperan penting dalam komunikasi sosial dan ekspresi budaya masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Identitas Linguistik dan Peran Dialek

Dialek tidak hanya sekadar varian linguistik dari sebuah bahasa, melainkan juga medium penting dalam membentuk dan merepresentasikan identitas linguistik individu maupun kelompok sosial. Dalam studi sosiolinguistik, identitas linguistik merujuk pada bagaimana seseorang atau suatu kelompok menyatakan dirinya melalui bahasa yang digunakan, baik dalam bentuk bahasa standar maupun dialek lokal (Joseph, 2004). Pemilihan dialek tertentu dalam interaksi sosial sering kali menandakan asal-usul geografis, kelas sosial, afiliasi kelompok etnis, atau bahkan sikap politik tertentu.

Penggunaan dialek merupakan bentuk ekspresi dari apa yang disebut sebagai "symbolic identity" atau identitas simbolik. Seorang penutur yang memilih menggunakan dialek lokal dalam situasi formal—yang biasanya mengharuskan penggunaan bahasa baku—bisa saja sedang melakukan resistensi kultural atau mempertegas afiliasi identitasnya terhadap komunitas tertentu (Holmes, 2013). Contohnya dapat ditemukan dalam konteks Arab: seorang penutur dari Maroko yang tetap menggunakan *lahjah Maghribiyah* di hadapan penutur dari Syam atau Mesir menunjukkan keterikatan kuat terhadap identitas regionalnya meskipun secara normatif Bahasa Arab Standar Modern lebih diutamakan dalam komunikasi lintasregional.

Identitas linguistik yang terikat pada dialek juga terlihat dalam konteks masyarakat multietnik. Di beberapa wilayah, penggunaan dialek bisa menunjukkan solidaritas kelompok dan memperkuat kohesi sosial. Seperti ditunjukkan oleh Gumperz (1982), pemakaian dialek lokal berfungsi sebagai "boundary marker" atau penanda batas sosial antara "kita" dan "mereka." Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana penggunaan Bahasa Jawa krama, Madura alus, atau Minangkabau halus menjadi identifikasi internal yang hanya dimengerti oleh komunitasnya dan menandakan kelas sosial atau tingkat keakraban dalam berkomunikasi.

Namun demikian, tidak semua dialek memiliki prestise sosial yang sama. Terdapat hierarki linguistik yang mengklasifikasikan dialek tertentu sebagai lebih "tinggi" atau "bermartabat" dibandingkan dialek lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi sosial, ekonomi, dan politik dari komunitas penutur dialek tersebut. Dalam hal ini, konsep *prestise terbuka* (overt prestige) dan *prestise tersembunyi* (covert prestige) menjadi relevan. Dialek dari kelompok dominan biasanya memiliki prestise terbuka karena digunakan dalam pendidikan, media, dan pemerintahan. Sebaliknya, dialek dari kelompok marjinal sering kali hanya dihargai dalam ruang budaya internal mereka sendiri (Labov, 1972).

Dalam beberapa kasus, dominasi bahasa baku yang ditetapkan negara telah mengusur fungsi dialek dalam ruang publik. Pendidikan formal, media massa, dan kebijakan kebahasaan cenderung mendiskreditkan dialek sebagai bentuk yang "tidak baku" dan tidak sesuai untuk ekspresi ilmiah, birokrasi, maupun nasionalisme. Padahal, dari sudut pandang linguistik, tidak ada satu pun dialek yang lebih unggul secara struktural dibandingkan yang lain. Setiap dialek memiliki sistem internal yang konsisten dan dapat dianalisis secara ilmiah (Wardhaugh & Fuller, 2015).

Meski begitu, dalam konteks globalisasi dan revitalisasi budaya lokal, posisi dialek mulai mengalami pemulihan. Banyak komunitas yang kini justru menghidupkan kembali dialek mereka sebagai simbol perlawanan terhadap homogenisasi budaya dan sebagai strategi pelestarian identitas lokal. Gerakan literasi berbasis dialek, dokumentasi bahasa daerah, serta penerbitan karya sastra dalam varian non-standar menjadi bukti bahwa dialek memainkan peran sentral dalam menjaga keberagaman linguistik (Crystal, 2003).

Oleh karena itu, peran dialek dalam pembentukan identitas linguistik tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia tidak hanya merepresentasikan perbedaan fonologis atau sintaktis dari bahasa utama, tetapi juga mencerminkan kedalaman struktur sosial, dinamika kekuasaan, dan keragaman ekspresi budaya dalam masyarakat manusia.

Dialek bukan sekadar "turunan" dari bahasa standar, melainkan ekspresi otentik dari identitas kolektif dan sejarah suatu komunitas.

Variasi Linguistik: Dimensi Sosial dan Geografis

Variasi linguistik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam masyarakat manusia. Bahasa tidak pernah bersifat seragam dan statis, melainkan selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan diferensiasi sesuai dengan faktor sosial, geografis, historis, dan situasional. Dalam kajian sosiolinguistik, variasi ini mencakup bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial tertentu dalam konteks tertentu, seperti dialek regional (geolek), dialek sosial (sosiolek), idiolek, hingga register dan gaya tutur (Holmes, 2013).

Salah satu bentuk variasi linguistik yang paling menonjol adalah variasi geografis, yang melahirkan dialek regional. Dialek ini berkembang karena pemisahan komunitas bahasa secara geografis sehingga menyebabkan diferensiasi secara bertahap dalam aspek fonologi, morfologi, leksikon, dan sintaksis. Contohnya dapat ditemukan dalam perkembangan dialek Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Meski berasal dari satu akar bahasa Arab Klasik, varian seperti Lahjah Syāmiyyah (Suriah), Lahjah Miṣriyyah (Mesir), dan Lahjah Maghribiyyah (Maroko) memiliki perbedaan signifikan dalam pengucapan, kosakata, bahkan struktur kalimat (Versteegh, 2014).

Selain itu, variasi sosial juga memainkan peran penting dalam diferensiasi bahasa. Faktor seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan status ekonomi dapat mempengaruhi cara individu berbicara. Labov (1972) dalam studinya yang terkenal di New York menunjukkan bagaimana kelas sosial menandai perbedaan pelafalan konsonan /r/ dalam lingkungan kerja formal. Penutur dari kelas sosial atas cenderung mempertahankan pelafalan /r/ dengan jelas sebagai bentuk prestise terbuka, sedangkan kelas sosial bawah lebih sering menghilangkannya.

Dalam konteks ini, sosiolek muncul sebagai varietas linguistik yang mencerminkan identitas dan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Sosiolek bukan hanya produk sosial, melainkan juga berfungsi mempertahankan batas antar kelompok sosial dan menegaskan solidaritas dalam kelompok. Penggunaan bahasa gaul oleh remaja, jargon profesi oleh kalangan medis atau hukum, hingga gaya bahasa santri dalam pesantren adalah bentuk konkret dari sosiolek yang memperkuat kohesi internal dan membedakan dari kelompok luar (Wardhaugh & Fuller, 2015).

Variasi linguistik juga tampak dalam register dan gaya tutur, yaitu perubahan pilihan kata, struktur kalimat, dan intonasi berdasarkan konteks atau situasi pembicaraan. Seorang pembicara mungkin menggunakan register formal saat berbicara di forum akademik, namun berganti menjadi register santai saat berbicara dengan teman. Fenomena ini memperlihatkan bahwa variasi bahasa juga bersifat situasional dan fungsional, bukan hanya geografis atau sosial (Fasold, 1990).

Fenomena diglosia yang terjadi dalam masyarakat Arab dan juga banyak masyarakat di Asia Tenggara menunjukkan variasi linguistik dalam bentuk paling kompleks. Di sini, dua atau lebih bentuk bahasa digunakan secara berdampingan dengan fungsi sosial yang berbeda. Bahasa Arab Fusha digunakan dalam konteks formal dan tulisan, sementara lahjah digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Diglosia memperlihatkan bahwa variasi bahasa dapat hidup dalam sistem hierarkis yang mapan, di mana setiap bentuk memiliki peran sosial yang diakui (Ferguson, 1959).

Namun, variasi linguistik juga dapat menjadi sumber diskriminasi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Penutur dialek tertentu sering kali mengalami stereotip atau marginalisasi karena dianggap "kurang intelek" atau "tidak sopan" dibanding penutur bahasa standar. Hal ini mencerminkan bahwa variasi bahasa bukan hanya urusan fonetik atau gramatikal, tetapi juga berkaitan erat dengan ideologi, kekuasaan, dan kontrol sosial dalam masyarakat (Bourdieu, 1991).

Dengan demikian, memahami variasi linguistik dari dimensi sosial dan geografis sangat penting dalam studi bahasa. Variasi tersebut tidak hanya menunjukkan kekayaan ekspresi linguistik, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Dialek dan varian bahasa lainnya menjadi cermin dinamika hubungan antarindividu dan antarkelompok, sekaligus menjadi medan interaksi antara bahasa, identitas, dan kekuasaan.

Peran Dialek dalam Perubahan Bahasa

Perubahan bahasa merupakan fenomena alamiah yang terjadi dalam setiap komunitas linguistik. Bahasa tidak bersifat statis, melainkan dinamis, mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan komunikasi masyarakatnya. Dalam proses ini, dialek memainkan peran sentral sebagai salah satu motor utama perubahan linguistik. Banyak inovasi bahasa yang pada mulanya muncul dari varian dialektal, lalu secara bertahap masuk ke dalam bentuk standar dan diterima secara luas (Aitchison, 2001).

Secara historis, berbagai unsur dalam bahasa baku modern berasal dari bentuk dialektal yang sebelumnya tidak memiliki prestise sosial tinggi. Dalam sejarah Bahasa Inggris, misalnya, banyak kosakata dan struktur tata bahasa standar yang diambil dari dialek London pada abad pertengahan. Hal ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas sistem bahasa, tetapi juga memperlihatkan

bagaimana pusat-pusat kekuasaan sosial dan ekonomi dapat mengangkat status dialek tertentu hingga menjadi bahasa resmi (Milroy & Milroy, 1999).

Dalam konteks Arab, dialek-dialek lokal (lahjāt) sering kali menjadi sumber ekspresi kreatif yang lebih responsif terhadap perubahan zaman dibandingkan dengan Bahasa Arab Fusha yang cenderung konservatif dan terikat pada norma klasik. Banyak ekspresi idiomatik, kosakata baru, dan bentuk ujaran dalam musik, media sosial, dan film berasal dari lahjah dan menjadi populer lintas wilayah. Ini menunjukkan bahwa dialek tidak hanya adaptif, tetapi juga produktif dalam menciptakan bentuk-bentuk baru bahasa (Versteegh, 2014).

Perubahan bahasa melalui dialek dapat terjadi dalam berbagai level linguistik, mulai dari fonologi, morfologi, leksikon, hingga sintaksis. Pada level fonologi, inovasi pelafalan tertentu yang berasal dari dialek bisa menyebar dan kemudian diterima sebagai variasi normatif. Contohnya, dalam bahasa Arab Mesir, pelafalan huruf qāf menjadi glottal stop (ʿ) secara perlahan diterima dalam komunikasi informal lintas regional, meskipun secara ortografis tetap ditulis sebagai qāf (Ferguson, 1959).

Selain itu, dialek juga berkontribusi dalam penciptaan neologisme atau bentuk kata baru, terutama dalam merespons kebutuhan komunikasi modern. Di era digital, penutur dialek menciptakan istilah-istilah baru yang tidak selalu memiliki padanan dalam bahasa baku. Kosakata dari dialek kemudian menyebar secara luas melalui media sosial dan digital culture, dan bahkan kadang masuk ke kamus atau menjadi standar dalam konteks informal. Fenomena ini menggambarkan bahwa inovasi linguistik sering kali bermula dari pinggiran, bukan dari pusat normatif bahasa (Crystal, 2003).

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa tidak semua inovasi dari dialek diterima begitu saja ke dalam bahasa standar. Seleksi sosial dan institusional tetap memegang peranan penting. Variasi yang berasal dari dialek dominan secara politik atau ekonomi lebih berpeluang untuk diadopsi, sementara bentuk-bentuk dari dialek marjinal cenderung diabaikan atau bahkan dianggap "salah". Proses ini menggambarkan bahwa perubahan bahasa tidak semata proses linguistik, tetapi juga refleksi dari struktur kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu, 1991).

Dengan demikian, peran dialek dalam perubahan bahasa bersifat strategis dan mendasar. Ia tidak hanya menjadi cermin dinamika sosial, tetapi juga laboratorium linguistik yang memungkinkan munculnya inovasi-inovasi baru. Mengabaikan peran dialek dalam perubahan bahasa berarti menutup mata terhadap realitas empirik bahwa transformasi bahasa terjadi dari bawah, secara organik, dan melalui praktik bahasa yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Analisis Kritis dan Implikasi

Relasi antara bahasa dan dialek, jika ditelaah secara kritis, bukanlah semata urusan linguistik, melainkan sebuah konstruksi sosial, politik, dan ideologis. Dalam tradisi linguistik struktural, dialek kerap dianggap sebagai varian dari bahasa standar yang hanya berbeda dalam aspek teknis seperti fonologi atau leksikon. Namun, pendekatan sosiolinguistik telah menunjukkan bahwa klasifikasi "bahasa" dan "dialek" adalah produk keputusan sosial dan politik yang sering kali tidak netral (Joseph, 2004). Di balik pemilihan istilah ini tersembunyi relasi kuasa yang memengaruhi status, legitimasi, dan bahkan eksistensi suatu bentuk bahasa.

Kecenderungan untuk menstandarkan satu bentuk bahasa dan menyingkirkan dialek-dialek lokal mencerminkan proses hegemonisasi linguistik, di mana negara atau kelompok dominan menentukan bentuk bahasa "resmi" yang boleh digunakan dalam pendidikan, birokrasi, dan media. Dalam banyak kasus, dialek lokal dipinggirkan dan diberi label negatif seperti "tidak ilmiah", "kampungan", atau "terbelakang". Akibatnya, banyak komunitas penutur dialek mengalami alienasi linguistik, yaitu keterputusan dengan bahasa ibu mereka sendiri karena tidak dianggap sebagai bagian dari bahasa yang sah (Bourdieu, 1991).

Padahal, secara linguistik tidak ada dialek yang "lebih baik" atau "lebih unggul" dibandingkan yang lain. Semua dialek memiliki sistem gramatikal yang konsisten, kosakata yang kaya, dan kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran kompleks. Pandangan ini menuntut perubahan paradigma dalam pendidikan dan kebijakan bahasa, agar tidak hanya menekankan standar formal, tetapi juga mengakomodasi keragaman bentuk-bentuk bahasa yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan yang berorientasi multibahasa atau multilingual education menjadi alternatif yang penting dalam konteks ini (Hornberger, 2009).

Dari segi identitas dan budaya, peminggiran terhadap dialek berdampak langsung pada erosi kebudayaan lokal. Bahasa dan dialek membawa serta nilai, norma, sejarah, dan cara pandang komunitas. Ketika dialek ditinggalkan, maka yang hilang bukan sekadar variasi linguistik, tetapi juga warisan simbolik dan memori kolektif dari suatu masyarakat. Revitalisasi dialek melalui dokumentasi, pengajaran lokal, dan pengakuan formal menjadi langkah penting untuk mempertahankan identitas kebahasaan dan kebudayaan (Fishman, 1991).

Implikasi dari analisis ini juga menyentuh ranah kebijakan publik. Pemerintah dan lembaga pendidikan seharusnya menyadari pentingnya peran dialek dalam memperkuat keterhubungan sosial dan penghargaan terhadap keragaman. Mengabaikan dialek sama halnya dengan mengabaikan hak linguistik masyarakat minoritas. Maka, pendekatan kebijakan bahasa yang lebih demokratis dan partisipatif menjadi sangat diperlukan,

yakni dengan melibatkan komunitas lokal dalam penentuan dan pelestarian bentuk bahasa mereka sendiri (Skutnabb-Kangas, 2000).

Lebih jauh, dari perspektif akademik, dialek perlu didekati bukan hanya sebagai objek studi linguistik, tetapi sebagai jendela untuk memahami perubahan sosial, pembentukan identitas, dan resistensi budaya. Studi tentang dialek bukan sekadar pengumpulan data fonetik, melainkan juga harus melibatkan analisis sosiologis, antropologis, dan bahkan politis. Integrasi pendekatan interdisipliner dalam kajian bahasa memungkinkan kita untuk lebih adil dalam menilai dan memahami kompleksitas relasi antara bahasa dan dialek (Heller, 2007).

Dengan demikian, relasi bahasa dan dialek harus dilihat secara kritis, bukan sebagai hierarki linguistik yang kaku, tetapi sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Memahami dialek sebagai bagian penting dari dinamika bahasa memungkinkan kita untuk menolak wacana tunggal tentang "bahasa yang benar" dan justru merayakan pluralitas sebagai kekayaan bersama.

Tabel Pemetaan Tematik dan Teoretis Relasi Bahasa dan Dialek

Aspek	Fokus Kajian	Keterangan Utama	Tokoh/Pendukung Teori
Definisi & Distingsi	Bahasa vs. Dialek	Bahasa sebagai sistem; dialek sebagai varian lokal/sosial	Saussure, Trudgill, Chomsky
Landasan Teori	Teori struktural dan sosiolinguistik	Bahasa bukan netral, tetapi terikat identitas dan politik	Crystal, Wardhaugh, Holmes
Identitas Linguistik	Dialek sebagai simbol identitas sosial dan kultural	Dialek membangun solidaritas, prestise, dan ekspresi resistensi	Joseph, Gumperz, Labov
Variasi Linguistik	Dimensi geografis dan sosial	Geolek, sosiolek, diglosia, register, gaya tutur	Ferguson, Hudson, Holmes
Perubahan Bahasa	Peran dialek dalam inovasi	Neologisme, pergeseran fonologi, sumbangan	Milroy & Milroy, Aitchison, Versteegh

	dan evolusi bahasa	struktur baru dari dialek	
Analisis Kritis	Relasi kuasa, hegemoni bahasa, dan marginalisasi dialek	Bahasa baku sering menyingkirkan dialek melalui kontrol simbolik dan institusional	Bourdieu, Skutnabb-Kangas, Heller
Implikasi Praktis	Pendidikan multibahasa, revitalisasi lokal, kebijakan bahasa inklusif	Dialek perlu diakui dalam sistem pendidikan dan identitas nasional	Fishman, Hornberger
Kesimpulan Umum	Dialek sebagai agen identitas, variasi, dan perubahan bahasa	Dialek bukan bentuk rendah, tetapi fondasi dinamis dari sistem kebahasaan dan sosial	Penulis

Tabel dalam artikel ini menyajikan pemetaan tematik dan teoretis mengenai relasi antara bahasa dan dialek dengan membagi pembahasan ke dalam tujuh aspek utama: definisi-distingsi, landasan teori, identitas linguistik, variasi linguistik, perubahan bahasa, analisis kritis, dan implikasi praktis. Setiap aspek dijelaskan secara ringkas melalui fokus kajian dan keterangan utama, serta didukung oleh tokoh atau teori yang relevan, seperti Saussure, Trudgill, Bourdieu, hingga Fishman. Tabel ini menunjukkan bahwa dialek tidak hanya dipahami sebagai bentuk linguistik semata, melainkan sebagai entitas sosial, politik, dan ideologis yang berkontribusi penting dalam pembentukan identitas, variasi bahasa, dan perubahan linguistik, sekaligus menjadi subjek marginalisasi dalam hegemoni bahasa baku.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara bahasa dan dialek bukanlah hubungan subordinatif antara bentuk “utama” dan “turunan”, melainkan relasi kompleks yang melibatkan aspek linguistik, sosial, historis, dan politis secara menyeluruh. Bahasa merupakan sistem sosial yang dinamis, dan dalam sistem itu, dialek hadir bukan sebagai bentuk deviasi, tetapi sebagai wujud sah dari keragaman ekspresi linguistik manusia.

Secara teoretis, dialek dapat berfungsi sebagai pembentuk identitas linguistik, penanda solidaritas sosial, dan representasi kultural suatu komunitas. Ia memainkan peran sentral dalam menegosiasikan relasi sosial antar kelompok, terutama dalam konteks diglosia dan hierarki prestise bahasa. Dalam hal ini, penggunaan dialek mencerminkan afiliasi sosial, resistensi terhadap dominasi budaya, serta afirmasi terhadap identitas lokal.

Variasi linguistik yang lahir dari faktor geografis dan sosial semakin memperkuat posisi dialek sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika bahasa. Dialek bukan sekadar bentuk lokal yang pasif, tetapi agen aktif yang mendorong perubahan linguistik secara progresif. Banyak inovasi dalam bahasa modern justru berasal dari transformasi yang berakar dari dialek.

Di sisi lain, pembahasan ini juga mengungkap adanya relasi kuasa dalam wacana bahasa. Peminggiran terhadap dialek melalui standarisasi, pendidikan, dan institusi formal merupakan bentuk dari hegemoni linguistik yang dapat melahirkan ketimpangan sosial dan marginalisasi budaya. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap bahasa dan dialek harus melibatkan refleksi ideologis atas struktur kuasa yang melingkupinya.

Keseluruhan pembahasan ini mengarah pada satu pemahaman penting: bahwa dialek adalah entitas yang bernilai secara linguistik, sosiologis, dan kultural. Dialek tidak boleh dipandang sebagai bahasa yang “rusak” atau “tidak sempurna”, melainkan sebagai jendela yang memperkaya cara kita melihat keberagaman manusia dalam berbahasa. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap dialek menjadi syarat penting dalam pembangunan identitas kebangsaan yang inklusif dan adil secara linguistik.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam kajian ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, baik dalam lingkup akademik, pendidikan, maupun kebijakan publik. Pertama, perlu adanya pengakuan yang lebih inklusif terhadap keberadaan dan peran dialek dalam sistem kebahasaan nasional. Selama ini, bahasa standar sering diperlakukan sebagai satu-satunya bentuk yang sah dalam pendidikan, birokrasi, dan media, sementara dialek dianggap subordinat atau tidak layak tampil di ruang publik. Padahal, dialek merupakan ekspresi otentik dari identitas lokal dan bagian penting dari warisan budaya bangsa.

Kedua, dalam ranah pendidikan, perlu diupayakan pengembangan kurikulum berbasis multibahasa (multilingual education) yang mengakomodasi dialek sebagai media transisi dan penguatan identitas lokal. Guru dan lembaga pendidikan seyogianya tidak memarjinalkan siswa yang menggunakan dialek, melainkan menjadikannya sebagai modal linguistik yang bisa diintegrasikan secara pedagogis. Hal ini akan mendukung

proses pembelajaran yang lebih inklusif, kontekstual, dan memperkuat jati diri peserta didik.

Ketiga, para peneliti bahasa dan sosiolinguistik didorong untuk mengembangkan kajian interdisipliner yang mengaitkan linguistik, antropologi, dan politik kebahasaan dalam melihat posisi dialek dalam masyarakat. Penelitian tidak boleh hanya berhenti pada dokumentasi linguistik, tetapi juga perlu menggali makna sosial, ideologis, dan politik dari penggunaan dialek dalam praktik sehari-hari, termasuk bagaimana dialek menjadi arena negosiasi identitas dan kekuasaan.

Keempat, dari sisi kebijakan publik, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memberikan ruang legal dan anggaran untuk revitalisasi dialek melalui program dokumentasi, pelatihan guru lokal, penerbitan bahan ajar berbasis dialek, serta festival bahasa dan budaya lokal. Upaya ini penting untuk mencegah kepunahan dialek serta memperkuat kebhinekaan linguistik sebagai bagian dari ketahanan budaya nasional.

Akhirnya, masyarakat secara luas perlu didorong untuk memiliki kesadaran linguistik bahwa setiap bentuk bahasa, termasuk dialek, memiliki nilai dan fungsi yang penting. Menghargai perbedaan dialek adalah bagian dari sikap toleran dalam kehidupan sosial dan cerminan dari penghormatan terhadap keragaman budaya. Maka dari itu, pendidikan bahasa perlu menumbuhkan semangat apresiatif, bukan diskriminatif, terhadap keberagaman bentuk bahasa yang hidup dalam masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, J. (2001). *Language Change: Progress or Decay?* Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of Language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Fasold, R. (1990). *The Sociolinguistics of Language*. Blackwell.
- Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. *Word*, 15(2), 325–340.
- Fishman, J. A. (1991). *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Multilingual Matters.
- Gumperz, J. J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge University Press.
- Heller, M. (2007). *Bilingualism: A Social Approach*. Palgrave Macmillan.
- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics* (4th ed.). Routledge.
- Hornberger, N. H. (2009). Multilingual education policy and practice: Ten certainties (grounded in indigenous experience). *Language Teaching*, 42(2), 197–211.
- Hudson, R. A. (1996). *Sociolinguistics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Joseph, J. E. (2004). *Language and Identity: National, Ethnic, Religious*. Palgrave Macmillan.
- Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Milroy, J., & Milroy, L. (1999). *Authority in Language: Investigating Standard English*. Routledge.
- Saussure, F. de. (1916). *Cours de linguistique générale*.
- Skutnabb-Kangas, T. (2000). *Linguistic Genocide in Education—or Worldwide Diversity and Human Rights?* Lawrence Erlbaum Associates.
- Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*. Penguin Books.
- Versteegh, K. (2014). *The Arabic Language* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics* (7th ed.). Wiley Blackwell.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.